



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ROSIHON ANWAR**
2. Jabatan : **REKTOR**
3. NHK : **747546**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.799.320.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/110 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 1.900 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 91.200.000
4. Tanah Seluas 3.780 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 126.360.000
5. Tanah Seluas 3.510 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 126.360.000
6. Tanah Seluas 1.400 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 89.600.000
7. Tanah Seluas 28.000 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.800.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/54 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
9. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 503.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 293.800.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.086.669.390

F. HARTA LAINNYA

Rp. 65.000.000

Sub Total

Rp. 3.748.289.390

III. HUTANG

Rp. 294.115.477

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.454.173.913

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.